

Islam Lokal, Diskriminasi dan Representasinya dalam Dunia Digital

Ahmad Muttaqin*

Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto
Jl. A. Yani No 40 A Purwokerto Utara, Banyumas, 53126, Indonesia

Abstract

Common discrimination is done by the majority Group against minorities. The majority group with the number and composition of more members feels the authority in a certain field so that they claim to do an action directed to the minority. The authority is constructed with a predominantly-minority dichotomistic mechanism aimed at maintaining power through the practice of domination. Minority groups will be difficult out of the practice of domination because of the available space in a dichotomist mechanism only exchanges positions. For minority groups, the exchange of positions is impossible because it uses quantity logic where the opportunity has been closed with a series of liberalization and bad stereotypes for example with distorted, perverted, and nyeleneh terminology.

Local Islam has a relatively similar position to other minority groups. He was subjected to discrimination from the dominant group commonly portrayed by the mainstream community and religious institutions that identified as the majority. The social space that may be enabled to publish institutions and activities is limited so the information available is inadequate. The continuing implications are misunderstandings or even justifications that encourage collective discrimination. This situation became difficult for local Islamist groups who eventually chose to be passive, stagnant, and without a vast activity. The presence of the digital world changes the configuration of relations between local Islamist groups and external parties as well as shifting the base of authority to the base of discriminatory actions.

This article will answer 2 (two) main questions of the first local Islamic response as a minority group against the proliferation of digital media that offers a new world that is more open and egalitarian. The social connection in this new world is formed not by an authority that is based on a majority-minority but technically-technologically dichotomistic mechanism. Second, the Solutive Digital world bid for local Islamist groups to parse the issue of sub domination. Social existence as an anti-thesis discrimination treatment is built with the basic principles of fast-paced, economical, and accessible digital media which it can only be met with productivity generating information up to date.

Keywords: Majority, Minority, Discrimination, Local Islam, Digital World.

Intisari

Diskriminasi umum dilakukan oleh kelompok mayoritas terhadap minoritas. Kelompok mayoritas dengan jumlah dan komposisi anggota lebih banyak merasa memiliki

*ahmadmuttaqin@uinsaizu.ac.id

DOI: [10.24090/JPA.V22I2.2021.PP261-278](https://doi.org/10.24090/JPA.V22I2.2021.PP261-278)

otoritas dalam bidang tertentu sehingga mereka mengklaim melakukan tindakan yang ditujukan kepada minoritas. Otoritas dibangun dengan mekanisme dikotomis dominasi-minoritas yang bertujuan mempertahankan kekuasaan melalui praktik dominasi. Kelompok minoritas akan sulit keluar dari praktik dominasi karena ruang yang tersedia dalam mekanisme dikotomis hanya bertukar posisi. Bagi kelompok minoritas, pertukaran posisi tidak mungkin dilakukan karena menggunakan logika kuantitas di mana kesempatannya telah ditutup dengan rangkaian liberalisasi dan stereotip buruk misalnya dengan terminologi yang menyimpang, sesat, dan nyeleneh.

Islam lokal memiliki posisi yang relatif sama dengan kelompok minoritas lainnya. Ia mengalami diskriminasi dari kelompok dominan yang umumnya digambarkan oleh komunitas arus utama dan lembaga keagamaan yang diidentifikasi sebagai mayoritas. Ruang sosial yang dimungkinkan untuk mempublikasikan lembaga dan kegiatan terbatas sehingga informasi yang tersedia tidak memadai. Implikasi lanjutannya adalah kesalahpahaman atau bahkan pembenaran yang mendorong diskriminasi kolektif. Situasi ini menjadi sulit bagi kelompok-kelompok Islamis lokal yang akhirnya memilih pasif, stagnan, dan tanpa aktivitas yang luas. Hadirnya dunia digital mengubah konfigurasi relasi antara kelompok Islamis lokal dengan pihak eksternal serta menggeser basis otoritas menjadi basis tindakan diskriminatif.

Artikel ini akan menjawab 2 (dua) pertanyaan utama pertama respon Islam lokal sebagai kelompok minoritas terhadap maraknya media digital yang menawarkan dunia baru yang lebih terbuka dan egaliter. Hubungan sosial di dunia baru ini dibentuk bukan oleh otoritas yang didasarkan pada mayoritas-minoritas, melainkan mekanisme dikotomis secara teknis-teknologi. Kedua, dunia Solutive Digital menawari kelompok-kelompok Islamis lokal untuk mengurai isu subdominasi. Eksistensi sosial sebagai antitesis diskriminasi perlakuan dibangun dengan prinsip dasar media digital yang serba cepat, ekonomis, dan mudah diakses yang hanya dapat dipenuhi dengan produktivitas yang menghasilkan informasi terkini.

Kata Kunci: Mayoritas, Minoritas, Diskriminasi, Islam Lokal, Dunia Digital.

Pendahuluan

Studi tentang minoritas secara umum mendasarkan argumentasi pokoknya pada praktik perilaku dan tindakan diskriminatif, rasis, atau eskklusi yang cenderung mengabaikan keberadaan kelompok dengan jumlah kecil. Indikator kuantitatif cukup dominan menjadi dasar argumentasi tersebut yang dikaitkan dengan ketersediaan ruang publik yang secara relasional menghadapi kelompok mayoritas yang mendominasi kelompok minoritas. (Haryatmoko, 2013) Ruang publik dikuasai kelompok dominan secara politis di mana komposisi suara ditentukan melalui besar atau kecilnya partisipan yang terlibat. Dengan komposisi ini maka bisa dipastikan kelompok dengan jumlah anggota besar akan mendominasi proses-proses sosial dan politik dalam ruang publik yang tercipta.

Diagnosa terhadap problem kelompok minoritas adalah merebut ruang publik dengan memperbanyak partisipan dan pengaruh-pengaruh politik di dalamnya. Pada saat yang sama, kelompok minoritas didorong untuk meningkatkan intensitas interaksi baik terhadap kalangan internal untuk membangun konsolidasi maupun ke pihak eksternal untuk memperluas jaringan kerja (*networking*). (Hadirman, 2009) Kelompok minoritas untuk merebut ruang publik memiliki beban ganda dalam wilayah internal dan eksternal yang apabila dihitung berdasar ketersediaan sumberdaya akan terlihat ketimpangan cukup lebar. Konsep ini berkembang karena teori-teori minoritas memposisikan hubungan-hubungan kuasa secara umum pada model segitiga. Kelompok minoritas dalam relasi kuasa terhubung dengan kekuasaan di satu sisi dan kelompok mayoritas di sisi yang lain. Kekuasaan dan kelompok dominan membangun hubungan konspiratif untuk menekan, mendominasi, dan mengeksploitasi kelompok minoritas. (Levine, 1992) Teoritisasi ini kemudian menjadi dasar diagnosa yang bersifat advokatif mendorong kelompok minoritas berdaya menguasai ruang-ruang publik terbuka. Gerakan advokasi ini terjebak dengan paradigma positivistik sehingga tidak mentransformasikan kelompok minoritas dalam bentuk yang lebih kreatif-inovatif. Proyeksinya lebih pada upaya mendorong kelompok minoritas memperbanyak modal sosial-politik untuk kemudian menggantikan posisi kelompok mayoritas (dominan) dalam membangun relasi kuasa.

Diskusi di atas mulai bergeser seiring dengan berkembangnya dunia digital yang membuka setiap kelompok sosial bisa mengakses ruang publik secara terbuka dan bebas. Ruang publik terdistribusi secara merata kepada semua kelompok yang secara tidak langsung melahirkan hubungan-hubungan yang sangat cair. Dengan sendirinya, teori penguasaan ruang publik dengan mendasarkan pada volume suara dan partisipan mengalami anomali. Dunia digital memindahkan ruang publik menjadi lebih personal, aksesable, dan egaliter sehingga memungkinkan setiap orang bisa

berinteraksi dengan siapapun tanpa harus membangun modal sosial-politik terlebih dahulu. (Zou & Schiebinger, 2018) Perubahan ini kemudian meniscayakan pergeseran terhadap studi tentang kelompok minoritas yang tidak lagi mendasarkan pada jumlah partisipan atau anggota, perebutan ruang publik, dan relasi kuasa aktor-aktor terkait.

Tulisan ini akan menjawab 2 (dua) pertanyaan yaitu *pertama* terkait respons kelompok minoritas (Islam lokal) terhadap perubahan dunia sosial digital yang menghilangkan kerangka mayor-minor, identitas afiliasi dan identitas personal. Kemudian *kedua* adalah terkait pemanfaatan dunia digital untuk membangun eksistensi kelompok minor dalam ruang publik. Teknologi digital menawarkan dunia tak terbatas yang selama ini menjadi problem mendasar kelompok minor. Ketersediaan ruang ekspresi yang sedikit, akses terhadap ruang publik yang terbatas, dan pembatasan-pembatasan sosial tidak lagi terjadi pada kelompok minoritas ketika masuk dalam dunia digital.

Argumentasi utama tulisan ini adalah perubahan dunia digital direspons kelompok minoritas dengan memperkuat identitas lokalnya, keunikan-keunikan tradisi dan kebudayaannya, serta ekspresi kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Argumentasi ini merupakan kecenderungan baru yang berbeda dengan sebelumnya di mana kelompok minoritas untuk mengatasi persoalan-persoalannya dengan memperbesar anggota atau berafiliasi dengan komunitas lain yang memiliki pengaruh atau kuantitas yang lebih besar. Dengan memperbesar atau berafiliasi tersebut kelompok minoritas berasumsi memiliki perlindungan atau setidaknya pembelaan atas persoalan yang melingkupinya.

Untuk memperkuat respons di atas, kelompok minoritas kemudian memanfaatkan *platform* media digital untuk membangun dunia dan ekosistem tertentu yang menempatkannya pada posisi sentral. Situasi ini sebelumnya tidak bisa dimiliki oleh kelompok minoritas karena akses terhadap ruang publik dibatasi. Melalui media digital, kelompok minoritas membangun interaksi dengan pihak eksternal secara terbuka dan bebas serta

mampu mengembangkan sebuah ekosistem berbasis pada habitus aslinya. Pemanfaatan media digital dilakukan dengan mengembangkan *channel* pada *platform* media sosial yang kemudian dijadikan sebagai instrumen membangun interaksi sosial secara lebih luas.

Respons terhadap Dunia Digital

Dunia digital merupakan revolusi dari teknologi mekanik dan elektronik analog yang berlangsung sejak tahun 1980-an. Perubahan ini tidak bisa dipisahkan dari sejarah revolusi dunia dalam bidang pertanian dan industri sebagai konsekuensi langsung dari cara produksi (*mode of production*) yang mengalami perkembangan. (Weiss, 1988) Cara produksi yang berubah berpengaruh secara langsung terhadap kehidupan manusia dalam berbagai bidang dan akan terus-menerus mencari bentuk paling ideal. Wujud dunia digital saat ini adalah internet yang mengkoneksikan setiap individu dalam dunia untuk saling berbagi dan mendistribusikan informasi. Setiap individu atau kelompok memiliki ruang yang terbuka dan tidak terbatas untuk mengembangkan komunikasi, interaksi, dan bekerjasama dengan seluruh komunitas dunia tanpa ada hambatan-hambatan fisik, politik, serta ideologi yang sebelumnya sering menjadi sekat-sekat identitas. Batas-batas sosial, politik, dan ideologi dalam dunia digital nyaris kabur yang kemudian bertransformasi menjadi hubungan-hubungan yang lebih fungsional.

Perkembangan dunia digital membuka ruang bagi setiap orang tanpa sekat-sekat identitas yang membatasi. Kondisi ini merupakan revolusi sosial dari bentuk-bentuk sebelumnya yang bercorak komunalisme dalam identitas-identitas suku/etnis, agama, status sosial, dan bangsa. Identitas-identitas tersebut sebelumnya menjadi dasar bagi individu atau kelompok dalam mengembangkan corak komunikasi, kelompok, hingga afiliasi-afiliasi sosial dan budaya. Artinya komunikasi yang terjadi sebelum ini adalah kontestasi identitas yang memiliki orientasi penguasaan satu dengan lainnya. Identitas menjadi instrumen kekuasaan untuk mendominasi kelompok *liyan*

(*the others*) yang selanjutnya mengarah pada penundukan baik dalam skala fisik maupun ideologi.(Bourdieu, 1994)

Teknologi digital yang membuka dunia mereduksi praktik-praktik dominasi sosial dari kelompok-kelompok berbasis komunalisme yang secara umum menggunakan instrumen-instrumen terselubung seperti ideologi, agama, atau klaim-klaim kebenaran lainnya. Instrumen terselubung tersebut bersifat eksklusif yang dimonopoli oleh kelompok dominan untuk selanjutnya dipaksakan kepada minoritas agar diterima sebagai kebenaran. Eksklusivitas ini dalam dunia digital tidak bisa dipraktikkan karena ruang publik tersedia secara terbuka dan bisa diakses oleh setiap individu atau kelompok. Standar-standar kebenaran didiskusikan dalam ruang terbuka sehingga memunculkan banyak perspektif yang bisa mengkonstruksikannya secara lebih holistik. Hal yang sama juga berlaku pada standar-standar universal yang seringkali dianggap absolut seperti agama.

Islam lokal sebagai salah satu kelompok minoritas memandang perkembangan dunia digital sebagai peluang untuk keluar dari persoalan-persoalan mendasarnya. Jumlah populasi yang sedikit dan ajaran serta tradisi yang dinilai anomali, deviatif, dan diferentiatif dengan bentuk umum (*mainstream*) menjadi pangkal kelompok ini didefinisikan minoritas sehingga sering menjadi sasaran tindakan diskriminasi dan eksklusi. (Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (Lakpesdam) NU Cilacap dan The Asia Foundation, 2016)Definisi minoritas sesungguhnya bersifat politis yang mengarahkan pada pemahaman umum bahwa tindakan-tindakan yang diarahkan kepadanya sebagai kewajiban. Karena bersifat politis maka bias kekuasaan di mana kelompok yang berposisi negasional dengan minoritas didefinisikan sebagai mayoritas sehingga memiliki otoritas yang lebih besar untuk menentukan standar-standar kebenaran.

Untuk merubah hubungan kuasa, kelompok minoritas harus bertransformasi dengan memenuhi indikator-indikator yang dimiliki mayoritas yaitu dari sisi jumlah populasi dan standar umum ajaran atau tradisi. Dua hal ini sesungguhnya sulit dipenuhi mengingat sejak awal

kelompok Islam lokal yang berorientasi terhadap pengembangan penganut serta penyesuaian-penyesuaian ajaran keagamaannya.(Reuter, 2009) Artinya skenario reduksi tindakan diskriminasi dan eksklusi terhadap kelompok minoritas adalah bentuk dominasi tersendiri karena bersifat klise dan utopis. Kelompok Islam lokal tidak mungkin memenuhi indikator tersebut sehingga akan tetap menempati posisi sebagai minoritas. Dunia digital meniadakan indikator-indikator kuasa yang secara langsung bisa diakses oleh kelompok minoritas untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan mendasarnya yaitu kebebasan ekspresi dan eksistensi.

Kebebasan ekspresi selama ini dibatasi karena penialain-penilaian subyektif kelompok dominan yang memposisikan Islam lokal sebagai pelaku ajaran dan tradisi yang anomali, deviatif, dan *antimainstream*. Pada masyarakat Jawa sering disebut dengan kelompok *nyeleneh*. Nalar Jawa memposisikan kelompok *nyeleneh* sebagai negatif yang akan dianggap wajar apabila mendapat perlakuan tertentu. Penilaian negatif ini dalam banyak kasus kemudian membatasi kelompok Islam lokal berekspresi secara verbal baik dalam kerangka keagamaan maupun sosial. Teknologi digital membuka kesempatan secara luas kelompok Islam lokal untuk mengekspresikan diri terutama terkait dengan keagamaannya tanpa kekhawatiran dibatasi atau bahkan dihalangi. Rasa aman dan terlindungi dalam ekspresi keagamaan ini tercipta tidak melalui dukungan politik berbasis komunalisme dan *mainstreamisme* keagamaan melainkan koneksi dengan komunitas dunia digital.

Pada saat ekspresi keagamaan dan sosialnya tersalurkan secara terbuka melalui dunia digital kelompok Islam lokal membangun komunikasi dengan pihak-pihak luar yang luas dan heterogen. Dengan waktu yang relatif cepat, komunitas luar bisa mengenal kelompok Islam lokal secara lebih memadai melalui sumber-sumber utama misalnya melalui video atau narasi-narasi yang dipublikasikan langsung oleh pelaku aslinya. Bias informasi yang potensial terjadi karena tertransmisikan oleh pihak lain bisa direduksi oleh

keberadaan media digital yang mempoisiskan netral. Pada proses inilah kelompok Islam lokal bisa mendapatkan pengakuan eksistensinya dari masyarakat lain melalui mekanisme respons *cyber/virtual*.

Ketersediaan media digital direspons positif kelompok Islam lokal untuk mengatasi persoalan mendasar diskriminasi dan eksklusi sosial dari pihak-pihak dominan. Media digital menjadi saluran tepat untuk mengekspresikan kegiatan-kegiatan keagamaan dan ekspresi kebudayaan secara terbuka di mana ruang tersebut tidak tersedia sepanjang masih berada dalam dominasi kelompok dominan. Ruang terbuka ini dimanfaatkan untuk memproduksi dan mereproduksi berbagai hal terkait dengan substansi ajaran dan kebudayaan Islam lokal yang kemudian dipublikasikan secara terbuka kepada masyarakat eksternal. Publikasi produksi ini kemudian mendapat apresiasi cukup signifikan yang memposisikan kelompok Islam lokal secara eksistensial diakui sebagai salah satu entitas agama dan kebudayaan di Indonesia. (Ahmad Muttaqin, 2016) Pengakuan eksistensi ini secara tidak langsung menggeser posisi sub dominan menjadi lebih sejajar dan berpengaruh signifikan terhadap proses-proses komunikasi dan interaksi antarkelompok dalam masyarakat.

Kelompok Islam lokal lebih percaya diri tampil di hadapan publik tanpa ada kekhawatiran menjadi sasaran diskriminasi dan eksklusi akibat identifikasi *nyeleneh*. Kelompok yang selama ini memposisikan dominan mengalami penurunan otoritas dan legitimasi pada saat popularitas Islam lokal meningkat yang berpengaruh signifikan terhadap proses resepsi dan pengakuan eksistensi sosialnya. (Reuter, 2009) Dengan pola ini bisa dipahami bahwa proses dominasi selama ini selain menggunakan pendekatan-pendekatan yang cenderung mendasarkan pada jumlah massa, juga isolasi yang menyebabkan kelompok sub dominan tidak bisa membangun interaksi eksternal. Narasi Islam lokal dikuasai oleh kelompok dominan yang sangat bias kepentingan politik dan kekuasaan.

Pemanfaatan *Platform* Media Digital

Media digital menyediakan beberapa *platform* yang bisa diakses secara gratis. Pada studi mutakhir, *platform* media digital menjadi indikator utama berlangsungnya disrupsi sosial yang menceraabut (*disembedded*) akar-akar budaya, ideologi, dan keyakinan sehingga menjadi kehilangan otoritasnya. Kekuatan-kekuatan dominan dalam bidang ekonomi, sosial, politik, dan budaya pada masa disrupsi sosial mengalami penurunan performa sebagai implikasi langsung berkurangnya otoritas dominatifnya terhadap bidang-bidang tradisionalnya. Kekuatan baru era digital yang muncul adalah insttisi-institusi berbasis *platform* dengan prinsip bisnis berbagi (*sharing*) yang melibatkan banyak aktor. Kekuatan baru ini tidak mendasarkan pada modal kapital sebagaimana institusi bisnis konvensional melainkan pada jaringan kemitraan dan sumberdaya manusia.

Media digital menjadi pasar sosial bebas (*free social market*) yang relatif meniadakan intervensi negara dalam proses produksi dan arus transaksi yang berlangsung. Proses seleksi yang berlangsung mendasarkan pada mekanisme sosial melalui praktik resepsi dan penolakan yang berlangsung demokratis, terbuka, dan cenderung bebas. Masyarakat bisa menyampaikan respons atas transaksi digital secara langsung melalui sikap setuju atau tidak setuju dan bahkan bisa saling memoblisasi untuk memperkuat pilihan-pilihannya. Dunia digital merubah terminologi benar dan salah serta mendisrupsi penguasa otoritas pada institusi tertentu. Subyek dunia digital yang disebut dengan netizen atau warganet menjadi pihak sentral yang menentukan segala sesuatu layak atau tidak ditransaksikan secara virtual.(Indah, 2017)

Beberapa jenis *platform* digital dimanfaatkan secara pragmatis oleh kelompok Islam lokal sebagai instrumen dan media untuk mempublikasi institusi, praktik, dan ajaran-ajaran kepada masyarakat luas. Berbeda dengan kelompok agama pada umumnya, publikasi ini tidak bertujuan untuk meningkatkan jumlah jama'ah tetapi lebih pada upaya memperkenalkannya secara mendalam. Melalui proses ini diharapkan masyarakat memiliki

pemahaman yang memadai sehingga bisa mengembangkan sikap-sikap yang apresiatif dan tidak terlibat untuk melakukan tindakan-tindakan yang mengarah pada bentuk diskriminasi.

Platform media digital pada masyarakat disruptif cukup efektif karena beberapa hal *pertama*, hilangnya atau setidaknya kepemilikan otoritas terdistribusi kepada banyak pihak sehingga potensi praktik-praktik dominasi tidak terjadi. Media digital menciptakan komunitas sosial baru yang memiliki logika berbeda dengan realitas sesungguhnya. Hukum, etika, dan standar interaksi sosial terbangun melalui konsensus-konsensus baru dengan indikator tertentu. Seseorang atau kelompok yang memiliki otoritas dalam dunia realitas belum tentu akan berposisi sama ketika bertransformasi pada dunia digital.(Cheong, 2014) Kemampuan beradaptasi serta mengadopsi indikator-indikator yang kompatibel sangat berpengaruh terhadap eksistensi seseorang atau kelompok dalam komunitas sosial baru ini. Singkatnya, komunitas sosial baru ini bukan sepenuhnya terbentuk dari realitas melalui aktivitas perpindahan melainkan melalui proses konstruksi yang mendasarkan pada prinsip dan standar-standar tersendiri. Bagi kelompok Islam lokal yang sub dominan dalam dunia realitas, komunitas sosial baru ini menawarkan peluang besar merubah posisi menjadi lebih berdaya dan sejajar dengan komunitas-komunitas lain. Ketika posisi dalam dunia digital sudah relatif mapan maka akan memiliki peluang besar untuk direplikasi dalam dunia realitas.

Kedua, secara sosial dan politik, terdistribusinya informasi kelompok Islam lokal mendorong pihak-pihak eksternal membangun hubungan komunikasi. Kondisi ini terjadi karena antarkelompok tidak terbatas oleh hambatan-hambatan komunikasi baik yang bersifat terselubung seperti ideologi dan afiliasi politik maupun yang verbal seperti pengetahuan dan praktik-praktik kebudayaan. Dua sifat hambatan komunikasi ini sebelumnya menjadi persoalan serius kelompok Islam lokal karena tertransmisi oleh kelompok-kelompok dominan. Terlepas motif yang dimiliki oleh kelompok eksternal dalam membangun komunikasi, keterhubungan dengan mereka

memberikan dukungan sosial dan politik bagi kelompok Islam lokal untuk keluar dari posisi sub dominasi. Mereka bertransformasi dari posisi sosial yang ditutupi (*covered society*) menuju masyarakat yang membuka diri (*opening up*). Media digital menjadi instrumen upaya membuka diri tersebut dengan memproduksi profil, ajaran, dan praktik-praktik kebudayaan yang selama ini ditampilkan secara ambigu.

Ketiga, media digital menjadi titik masuk (*entry point*) baru bagi pihak-pihak eksternal membangun komunikasi. Seleksi sosial diberlakukan untuk menghindari praktik-praktik dominasi sebagai kondisi yang sejak awal ingin diurai melalui aktivitas dalam dunia digital. Melalui media digital, pihak-pihak eksternal memperoleh informasi awal kelompok Islam lokal yang apabila memiliki kecenderungan positif akan bisa dilanjutkan dengan hubungan-hubungan yang lebih intensif. Artinya media digital selain difungsikan sebagai instrumen mendistribusi informasi juga sebagai transmisi seleksi terhadap kelompok-kelompok yang berkeinginan mengembangkan hubungan komunikasi lebih lanjut. Melalui proses ini hubungan-hubungan komunikasi yang berlanjut relatif memberikan hal positif bagi kelompok Islam lokal terutama terkait dengan perubahan posisi sub dominasi.

Representasi Lokalitas dalam Dunia Digital

Kecenderungan umum masyarakat pada era disrupsi adalah memperoleh informasi secara cepat, sederhana, dan murah. (Rhenald Kasali, 2018) Informasi ini menjadi kebutuhan mendasar sebagai konsekuensi perubahan cara produksi masyarakat dalam kehidupan yang serba digital. Kebenaran yang didukung oleh institusi atau person yang otoritatif tidak menjadi referensi utama sepanjang informasi dari sumber-sumber tersebut menggunakan pola konvensional di mana proses aksesnya membutuhkan waktu relatif panjang. Kecenderungan ini terjadi disebabkan karena masyarakat disruptif memiliki kebutuhan kompleks yang dinamis, bergerak, dan berubah dari kebutuhan satu ke kebutuhan berikutnya. Konsumsi atas

sebuah produk belum tentu didasarkan pada motif kebutuhan pokok tetapi juga untuk memenuhi unsur-unsur lain sebagai variasi masyarakat modern seperti fashion, gaya hidup, dan bentuk-bentuk sosialita lainnya. (Yasraf Amir Piliang, 1998) Dengan model kebutuhan yang variatif ini, kualitas pemenuhan tidak menjadi preferensi utama seseorang mengakses sebuah produk melainkan kecepatan dan simplivitas dengan harga ekonomis.

Frekuensi konsumsi menjadi *trend* kehidupan masyarakat dalam dunia digital yang ditandai dengan mobilitas penguasaan produk satu ke lainnya. (Jean Baudrillard, 1994) Semakin seseorang memiliki mobilitas konsumsi yang tinggi maka akan berpotensi masuk dalam kategori sosial modern, *uptodate*, atau istilah-istilah lain yang berkembang mutakhir. Implikasi dari kecenderungan ini adalah produksi residu barang-barang konsumsi meningkat karena masa guna yang relatif pendek. Indikator ini bisa dilihat dari tingginya transaksi pada pasar barang setengah pakai (*second*) yang bisa dengan mudah diakses melalui aplikasi-aplikasi belanja *online*. Meskipun demikian, dalam dunia digital transaksi residu bisa direkonstruksi menjadi kebutuhan baru dalam kemasan gaya hidup (*life style*) sehingga para subyek yang terlibat tetap merasa konfortabel dengan barang-barang bekas yang dipertukarkan. (Jean Baudrillard, 1994)

Perubahan sosial ini menunjukkan produksi kebenaran tidak bisa didominasi oleh seseorang atau kelompok yang mengkalim sebagai pihak paling otoritatif tetapi menyebar dan terdistribusi kepada subyek-subyek yang memiliki kapasitas dalam dunia digital. Subyek yang mampu menghadirkan informasi secara cepat, mudah, dan sederhana memiliki peluang sebagai pihak yang paling berpotensi memperoleh keuntungan besar meskipun dari sisi personal tidak memiliki kapasitas yang memadai. Hal ini karena masa edar sebuah informasi hanya berlangsung dalam waktu yang singkat dan bergerak kepada informasi baru. Kualitas informasi tidak terlalu menjadi preferensi utama dalam melakukan suatu tindakan tetapi kecepatan dan perubahan yang dinamis (*uptodate*). Menuntut ketersediaan informasi yang berkualitas membutuhkan waktu relatif panjang yang apabila

dikontekstualisasikan pada masyarakat digital-disruptif menjadi tidak strategis. Mobilitas, perubahan, dan dinamika sebagai indikator kunci masyarakat digital membutuhkan suplai informasi yang berkarakter sama.

Persoalan diskriminasi berakar pada penguasaan otoritas kebenaran yang termanifestasi dalam varian wujud sesuai dengan bidang-bidang eksklusifnya. Dalam konteks politik, klaim kebenaran dikuasai oleh kelompok mayoritas sebagai konsekuensi implementasi mekanisme demokratis. Varian-varian kebenaran kemudian termanifestasi dalam bentuk kebijakan publik yang dalam prosesnya dominasi kelompok mayoritas sangat terlihat. Dominasi ini akan semakin nampak apabila berlangsung proses-proses politik di mana ditandai dengan negosiasi dalam pengambilan keputusan kolektif. Kelompok minoritas mengalami diskriminasi dan eksklusi politik melalui mekanisme misalnya pengambilan suara yang didasarkan perolehan terbanyak (*vooting*). Dalam konteks agama, kelompok dominan dikuasai oleh jumlah penganut mayoritas sebagai arus utama (*mainstream*). Kelompok ini mendominasi klaim-klaim kebenaran agama melalui pembentukan institusi-institusi yang diberi mandat salah satunya untuk mengidentifikasi potensi penyimpangan terhadap konstruksi *mainstream*. Institusi ini bekerja untuk mensuplai otoritas yang melegitimasi kelompok mayoritas menjalankan dominasinya atas kelompok-kelompok agama yang beranggota minor.

Otoritas sebagai modal sosial (*social capital*) tidak berubah, tetapi sumber-sumbernya mengalami pergeseran. Pada masyarakat konvensional, otoritas dibangun dan dikonstruksi melalui penguatan kapasitas personal dan kelompok. (Michel Foucault, 1972) Sementara dalam dunia digital otoritas dibangun melalui produksi dan reproduksi informasi yang *uptodate*. Pergeseran *social capital* ini dalam banyak lapangan menjadikan konfigurasi subyek pemilik otoritas berubah. Beberapa subyek dunia konvensional kehilangan otoritasnya, dan saat bersamaan muncul pelaku-pelaku baru media digital yang menguasai proses sosial virtual yang berlangsung. Subyek otoritatif yang bertahan adalah mereka yang mampu beradaptasi dan

mengakomodasi prinsip-prinsip dunia digital. Namun demikian sumber otoritas bergeser dari kapasitas kuasa-pengetahuan kepada kualifikasi teknis-teknologis media digital.

Kelompok Islam lokal sebagai minoritas dalam dunia konvensional dipandang tidak memiliki otoritas keagamaan yang memadai. Dari sisi kuasa dan pengetahuan, kelompok ini bukan menjadi bagian dari *mainstream* sehingga segala sesuatu yang melekat dianggap tidak memiliki keabsahan. Media digital menawarkan dunia baru yang kemudian dimanfaatkan untuk membangun identitas dan institusinya. Namun sesuai dengan karakter dasar dunia digital, resepsi kelompok Islam lokal bukan pada wilayah otoritas sebagaimana terjadi dalam dunia konvensional melainkan pada sisi yang bersifat teknis-teknologis. Secara pengetahuan dan kekuasaan, kelompok Islam lokal tidak dipandang lebih otoritatif ketimbang agama *mainstream*. Artinya resepsi masyarakat dalam dunia digital tidak berkonsekuensi terhadap penerimaan ajaran tetapi lebih memosisikannya sebagai sesuatu yang unik dan layak dikonsumsi sebagai informasi yang bisa diperoleh secara cepat, mudah, dan *uptodate*.

Kemampuan mengikuti prinsip-prinsip teknis-teknologis ini sangat menentukan bertahan tidaknya eksistensi kelompok Islam lokal dalam dunia digital. Pada saat kemampuan memperbaharui informasi secara cepat bisa dipertahankan maka penerimaan *netizen* akan tinggi, sebaliknya apabila informasi yang diproduksi lambat yang menyebabkannya menjadi *out of date* maka akan segera hilang dari topik-topik yang diperbincangkan. Situasi ini terjadi karena keterikatan subyek dunia digital adalah teknis dan cenderung pragmatis sehingga tidak meleburkan dalam dimensi mental dan ideologis. Subyek dunia digital tidak mendukung secara total terhadap pelaku yang lain. Sebaliknya juga tidak akan berempati atau menunjukkan keberpihakannya ketika subyek lain mendapat masalah. Seorang pelaku memiliki wajah yang beragam dan bisa bertransformasi dari karakter satu kepada yang lain dengan cara yang cepat.

Pemanfaatan media digital oleh kelompok Islam lokal memiliki 3 (tiga) kecenderungan, *pertama*, secara pragmatis diarahkan untuk mengeluarkannya dari diskriminasi kelompok dominan terutama yang berasal dari agama *mainstream*. Identitas merupakan unsur yang dieksploirasi karena selama ini menjadi basis utama tindakan-tindakan diskriminasi. Identitas yang terbuka kemudian mendatangkan respons secara massif (*viral*) menggeser posisi pinggiran (*peripheral*) menuju pusat perhatian. Pergeseran inilah yang sesungguhnya secara sosial dan politik mengeluarkan Islam lokal dari subordinasi dan perlahan mengambil posisi strategis dalam konstelasi masyarakat agama.

Kedua, watak dunia digital yang cepat, sederhana, dan murah relatif mengabaikan otoritas substantif terhadap segala sesuatu. Karakter penerimaan terhadap obyek bukan pada identifikasi benar atau salah melainkan sisi kebaruan (*uptodate*) yang secara sosiologis memiliki masa edar yang singkat. Oleh karena itu, eksistensi dalam dunia digital bukan pada bobot atau kualitas informasi yang disampaikan melainkan dari frekuensi yang memberi kesempatan pelaku memiliki masa edar berkelanjutan. Selain itu, informasi dengan frekuensi yang tinggi tidak memberikan dampak serapan yang berat. Artinya masyarakat dunia digital lebih cenderung mengambil informasi ringan, mudah dilihat (*easy watching*), dan memberikan efek relaksasi. Dorongan mengetahui subyek terhadap informasi bukan pada level memahami (*understanding*) yang membutuhkan informasi dan data menyeluruh. Menyediakan data utuh justru tidak bernilai informatif tetapi lebih berfungsi sebagai penyimpanan.

Ketiga, kecepatan sebagai prinsip dunia digital menuntut setiap partisipannya memiliki dinamika tinggi, perubahan progresif, serta inisiatif-inovatif yang bisa didistribusikan secara terbuka melalui ruang-ruang terbuka virtual. Tuntutan ini mendorong partisipan mengikutinya melalui reaktivasi individu dan kelompok secara parsial atau menyeluruh. Kelompok Islam lokal selama subordinasi relatif menjadi komunitas pasif dan stagnan

untuk menghindari perlakuan diskriminasi yang lebih besar. Pada fase tertentu, stagnasi dalam jangka yang panjang bisa terinternalisasi menjadi kebiasaan dan berujung sebagai karakter subyektif. (Peter L. Berger dan Thomas Luckman, 1991) Dunia digital kemudian mendorong kelompok Islam lokal berubah membangun inisiatif-inisiatif baru dan mengkonsolidasikan anggota-anggotanya melalui tindakan produktif dalam berbagai bidang yang ditekuninya. Dunia digital menjadi instrumen pengembangan komunitas melalui representasi dunia baru yang sangat berbeda dengan dunia konvensional.

Kesimpulan

Media digital menawarkan dunia baru yang lebih bebas, terbuka, dan setara. Otoritas yang selama ini banyak menjadi masalah karena bias politik dan kepentingan direduksi melalui nilai dan prinsip-prinsip baru di mana setiap subyek dan kelompok bisa memenuhinya sebagai standar interaksi dunia digital. Nilai dan prinsip baru tersebut mendasarkan pada watak media digital dan konstruksi masyarakat disruptif yang cenderung membutuhkan informasi yang cepat, ekonomis, dan mudah diakses. Dengan watak dasar ini, otoritas bergeser dari kuasa dalam istilah Michel Foucault atau kompetensi dalam terminologi positivistik menjadi keterampilan teknis-teknologis. Seseorang atau kelompok akan dinilai sebagai otoritatif apabila memiliki kemampuan teknis-teknologis dalam memproduksi informasi yang didistribusi secara cepat, ekonomis, dan aksesibel. Informasi dalam konteks dunia digital bukan sepenuhnya sesuai dengan terminologi ilmu pengetahuan yang logis, sistematis, dan metodologis tetapi cenderung dalam bentuk yang praktis, sederhana, dan *comon sense*. Hal ini karena masyarakat dalam dunia digital membutuhkan informasi yang cepat sebagai panduan untuk melakukan sesuatu. Masyarakat digital sangat dinamis dalam arti mobilitas tinggi yang bergerak dari satu tindakan ke lainnya. Oleh karena itu maka yang terpenting bukan pada sisi kualitas melainkan frekuensi.

Menyadari watak dasar media dan dunia digital demikian, kelompok Islam lokal yang selama ini mengalami perlakuan diskriminatif merespons

perubahan disruptif untuk mengurai persoalan-persoalan dasarnya di luar metode konvensional. Sebagai ruang terbuka, media digital menjadi instrumen untuk membangun komunikasi dengan pihak eksternal mempublikasi identitas yang selama ini sengaja ditutup atau dibatasi oleh kelompok dominan. Distribusi identitas ini secara tidak langsung membentuk pemahaman publik tentang identitas yang pada ujungnya mendasari pengakuan eksistensi sosial institusi Islam lokal. Pada fase ini, posisi kelompok Islam lokal bertransformasi dari subordinasi menjadi lebih setara.

Untuk mempertahankan eksistensi sosial, kelompok Islam lokal konsisten menjaga frekuensi produksi informasi melalui sekuel bersambung yang menggambarkan secara kronologis institusi dan aktivitas-aktivitas kuncinya. Berbeda dengan dunia konvensional, eksistensi dalam dunia digital tidak berimplikasi dukungan terhadap kelompok sub dominan tetapi lebih pada upaya memperoleh status *uptodate*. Melalui status ini, kelompok Islam lokal dianggap memiliki otoritas dalam dunia digital yang mampu menghindarkannya dari perlakuan diskriminatif.

Daftar Pustaka

- Ahmad Muttaqin. (2016). *Varian Islam dalam Masyarakat Jawa Banyumasan. P3M STAIN Purwokerto.*
- Bourdieu, P. (1994). *In Other Words, Essays Toward a Reflexive Sociology.* Cambridge: Polity Press.
- Cheong, P. H. (2014). Tweet the message? Religious authority and social media innovation. *Journal of Religion, Media and Digital Culture*, 3(3), 1–19. <https://doi.org/10.1163/21659214-90000059>
- Hadirman, F. B. (2009). *Demokrasi Deliberatif: Menimbang Negara Hukum dan Ruang Publik dalam teori Diskursus Habermas.* Yogyakarta: Kanisius.
- Haryatmoko. (2013). *Dominasi penuh Muslihat, Akar Kekerasan dan Diskriminasi.* Jakarta: Gramedia.
- Indah, R. N. (2017). *Netizen Rhetoric on Indonesian Issues in Social Media, dalam Promoting Literacy in Digital Age.* Yogyakarta: Aditya Media.

- Jean Baudrillard. (1994). *Simulacra and Simulation*. Michigan: The University of Michigan Press.
- Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (Lakpesdam) NU Cilacap dan The Asia Foundation. (2016). *Laporan Program Peduli Eksklusi Sosial terhadap Penghayat Kepercayaan tahun 2016*.
- Levine, J. A. C. and D. P. (1992). *Theories of Political Economy*. Cambridge: Cambridge University.
- Michel Foucault. (1972). *Power Knowledge, Selected Interviews and Other Writings, 1972-1977*. New York: Phantoen Book.
- Peter L. Berger dan Thomas Luckman. (1991). *The Social Construction of Reality, A Treatise of The Sociology of Knowledge*. London: Penguin Book.
- Reuter, T. (2009). The Rise of New Ethnic and Religious Movement in Post-Soeharto Indonesia. *Asian Journal of Social Science*, 37 No 6.
- Rhenald Kasali. (2018). *Self Disruption*. Jakarta: Mizan.
- Weiss, J. (1988). *Industry in Developing Countries, Theory, Policy and Evidence*. London: Routledge.
- Yasraf Amir Piliang. (1998). *Sebuah Dunia yang Dilipat, Realitas Kebudayaan menjelang Milenium Ketiga dan Matinya Posmodernisme*, (Bandung: Mizan, 1998), hlm. 214-215. Bandung: Mizan.
- Zou, J., & Schiebinger, L. (2018). AI can be sexist and racist — it's time to make it fair. *Nature*, 559(7714), 324–326. <https://doi.org/10.1038/d41586-018-05707-8>